

Relokasi dan Rehabilitasi: Upaya Pemulihan Masyarakat Pasca Banjir Lahar Dingin Akibat dari Erupsi Gunung Marapi

Ghina Asyifa Rahmadani¹, Aliya Rhamadani², Delmira Syafrini^{3*},
Bunga Dinda Permata⁴, Husnatul Ayni⁵, Aliya Syaputri Piliang⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: delmirasyafrini@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses relokasi dan rehabilitasi sebagai bagian dari upaya pemulihan masyarakat pasca bencana banjir lahar dingin yang terjadi akibat erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penelitian ini menarik untuk dikaji, mengingat proses pemulihan tidak hanya berkaitan dengan pemindahan fisik masyarakat dari lokasi terdampak, tetapi juga menyangkut pemulihan menyeluruh terhadap kualitas hidup mereka, baik secara ekonomi, sosial, maupun mental. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti di lokasi kejadian banjir lahar dingin di Kabupaten Agam. Wawancara mendalam dilakukan terhadap tiga informan dari masyarakat terdampak untuk menggali informasi mengenai dampak yang mereka rasakan pascabencana serta upaya pemulihan yang telah diberikan. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen terkait, seperti foto kerusakan jalan, rumah, dan proses perbaikan pascabencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi dilakukan secara bertahap dengan dukungan pemerintah berupa *pertama*, pemberian beberapa unit rumah bagi warga terdampak. *Kedua*, bantuan dari relawan. *Ketiga*, bantuan psikologis dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi. *Kempat*, pemulihan ekonomi.

Kata Kunci: Erupsi Gunung Marapi; Relokasi; Rehabilitasi.

Abstract

This study aims to describe the process of relocation and rehabilitation as part of the post-disaster recovery efforts following the cold lava flood caused by the eruption of Mount Marapi in Agam Regency, West Sumatra. This topic is worth exploring as recovery efforts are not limited to the physical relocation of affected communities but also involve a comprehensive restoration of their quality of life, including economic, social, and mental aspects. This research uses a qualitative approach with data collection techniques including field observation, in-depth interviews, and documentation. Observations were conducted directly at the cold lava flood disaster site in Agam Regency. In-depth interviews were carried out with three informants from the affected communities to gather information on the impacts they experienced and the recovery efforts provided. Documentation involved collecting relevant materials such as photographs of damaged roads, houses, and the post-disaster rehabilitation process. The findings indicate that the relocation was carried out gradually with government support in the form of (1) the construction of new housing units for affected residents, (2) assistance from volunteers, (3) psychological support in the form of counseling and outreach programs, and (4) economic recovery efforts.

Keywords: Marapi mountain eruption; Relocation; Rehabilitation.

How to Cite: Rahmadani, G. A. et al. (2025). Relokasi dan Rehabilitasi: Upaya Pemulihan Masyarakat Pasca Banjir Lahar Dingin Akibat dari Erupsi Gunung Marapi. *Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2025. (pp. 144-152). Padang: Universitas Negeri Padang.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di antara tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu Lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Posisi geologis ini menjadikan Indonesia sangat rawan terhadap berbagai jenis bencana alam, terutama yang bersifat geologis seperti gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung api. Kerentanan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor alamiah, tetapi juga diperparah oleh kepadatan penduduk, tata ruang yang tidak tertata dengan baik, serta minimnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 884 kejadian bencana alam terjadi sepanjang tahun 2017, menunjukkan tingginya frekuensi bencana di Indonesia. Dalam konteks ini, pengelolaan bencana yang efektif menjadi sangat krusial untuk meminimalisir dampak dan mempercepat proses pemulihan. Alfin menekankan bahwa manajemen bencana di Indonesia harus mencakup tidak hanya tahap tanggap darurat, tetapi juga tahapan mitigasi, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan pasca bencana, seperti relokasi dan rehabilitasi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen bencana secara keseluruhan. Keberhasilan pemulihan pasca bencana sangat ditentukan oleh seberapa efektif pemerintah dan masyarakat dalam mengelola risiko, membangun kembali kehidupan sosial ekonomi, serta menciptakan ketahanan komunitas terhadap bencana di masa depan (Alfin, 2022). Salah satu bencana yang sering terjadi dan memiliki dampak multidimensi adalah letusan gunung api, yang tidak hanya menimbulkan kerusakan langsung, tetapi juga memicu bencana sekunder seperti banjir lahar dingin.

Aktivitas vulkanik Gunung Marapi kembali meningkat pada akhir tahun 2023 dengan terjadinya erupsi yang memicu aliran banjir lahar dingin di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Agam dan sekitarnya. Berdasarkan laporan resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), erupsi tersebut menyebabkan peningkatan volume material vulkanik di lereng gunung yang kemudian terbawa aliran air hujan, memicu bencana banjir lahar dingin yang merusak infrastruktur dan permukiman warga (Magma Indonesia, 2024). Salah satu dampak paling signifikan dari erupsi ini adalah terjadinya banjir lahar dingin yang membawa material vulkanik melalui sungai-sungai yang berhulu di kaki Gunung Marapi.

Erupsi Gunung Marapi yang terjadi pada akhir tahun 2023 berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Aliran banjir lahar dingin yang dipicu oleh intensitas hujan tinggi membawa material vulkanik dan menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur, permukiman, lahan pertanian, serta mengganggu aktivitas sosial ekonomi warga. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat, lebih dari seribu kepala keluarga terdampak langsung oleh bencana ini, dengan kerugian material yang mencakup puluhan rumah rusak berat, akses jalan terputus, dan terganggunya layanan publik di beberapa nagari (Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat, 2024). Kondisi ini menyebabkan masyarakat kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, serta menghadapi tekanan sosial dan psikologis yang signifikan.

Strategi pemulihan pasca bencana tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan *top-down* dari pemerintah, tetapi juga perlu melibatkan komunitas lokal secara aktif. Elan Silvia Sari (2024) menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam pemulihan pasca bencana, di mana masyarakat lokal bukan hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga berperan sebagai subjek utama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi. Melalui pelibatan masyarakat, pemulihan dapat dilakukan secara lebih kontekstual, berkelanjutan, dan memperkuat ketahanan sosial dalam jangka panjang. (Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2011; Elan, 2024). Namun, implementasi kedua strategi ini tidak lepas dari berbagai kendala, seperti keterbatasan lahan, kesiapan fasilitas di lokasi relokasi, serta proses adaptasi masyarakat terhadap lingkungan baru.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji dampak erupsi Gunung Marapi dari berbagai perspektif, salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Andri Yanto yang berfokus pada analisis kerusakan lahan dan upaya mitigasi bencana di kawasan sekitar Gunung Marapi. Dalam penelitiannya, Andri Yanto mengungkapkan bahwa erupsi Gunung Marapi telah menyebabkan kerusakan signifikan pada lahan pertanian, permukiman, serta infrastruktur vital yang berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Studi tersebut juga menekankan pentingnya penerapan strategi mitigasi yang terpadu, meliputi peringatan dini, pengelolaan kawasan rawan bencana, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman erupsi. Temuan ini memberikan landasan penting bagi upaya relokasi dan rehabilitasi yang menjadi fokus utama dalam pemulihan pasca bencana, khususnya dalam konteks pemulihan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial di Kabupaten Agam (Andri, 2024). Sementara itu, Leli Honesti dalam penelitiannya mengenai dampak sosial dan lingkungan letusan Gunung Marapi menguraikan bahwa peristiwa tersebut tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga memicu disrupsi sosial yang kompleks. Ia menemukan bahwa masyarakat terdampak mengalami tekanan psikologis, kehilangan rasa aman, serta berkurangnya kohesi sosial akibat relokasi paksa dan

perubahan struktur komunitas. Di sisi lain, lingkungan hidup juga mengalami kerusakan seperti tercemarnya sumber air dan matinya ekosistem lokal, yang memengaruhi keberlanjutan hidup masyarakat sekitar (Honesti, 2023). Menambah perspektif tersebut, Rahadah Aisy melakukan penilaian risiko banjir lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar yang juga terdampak aktivitas vulkanik Gunung Marapi. Penelitiannya menunjukkan bahwa potensi banjir lahar dingin sangat tinggi pada wilayah-wilayah yang berada di sepanjang aliran sungai berhulu di Gunung Marapi. Ia menekankan pentingnya sistem peringatan dini serta strategi pengurangan risiko berbasis komunitas untuk mencegah korban jiwa dan kerusakan harta benda (Rahadah, 2024) melalui studi mereka mengenai efektivitas program relokasi korban bencana lahar dingin di Jawa Barat, menyoroti pentingnya integrasi antara perencanaan relokasi dan pemulihan ekonomi masyarakat. Mereka menemukan bahwa keberhasilan program relokasi tidak hanya ditentukan oleh penyediaan hunian fisik, tetapi juga oleh keberlanjutan mata pencaharian, akses terhadap layanan dasar, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Saputra & Wibowo (2023) dalam penelitiannya mengenai rehabilitasi sosial ekonomi masyarakat terdampak bencana vulkanik di Jawa Timur, menyoroti pentingnya pendekatan terpadu dalam proses pemulihan. Mereka menemukan bahwa program rehabilitasi yang sukses adalah yang mampu menjawab kebutuhan dasar, memberikan pelatihan keterampilan, membuka akses permodalan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun kembali kehidupan ekonomi mereka secara mandiri. Studi ini memperkuat urgensi pemberdayaan ekonomi sebagai bagian integral dari upaya rehabilitasi jangka panjang. Utami & Purwanto (2022) meneliti rehabilitasi sosial ekonomi masyarakat terdampak bencana vulkanik di Jawa Timur. Meskipun demikian, kajian mendalam mengenai strategi relokasi dan rehabilitasi secara khusus di Kabupaten Agam masih terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif proses relokasi dan rehabilitasi masyarakat terdampak banjir lahar dingin akibat erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebagai bagian dari strategi pemulihan pasca bencana yang inklusif dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sungai Pua dan Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2025. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus, yang bertujuan untuk mendalami secara rinci pengalaman, dinamika sosial, dan pandangan masyarakat terdampak banjir lahar dingin akibat erupsi Gunung Marapi. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, jumlah informan yang dilibatkan sebanyak tiga orang, yang merupakan warga terdampak banjir lahar dingin di Kabupaten Agam. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan informan untuk memperoleh informasi pengalaman mereka secara detail, serta dokumentasi dari sumber-sumber resmi seperti situs Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, Dinas Sosial, dan arsip pemerintahan terkait bencana. Untuk memastikan keakuratan dan validitas data, penelitian menerapkan triangulasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber, metode, dan waktu yang berbeda (Moleong, 2018). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis data interaktif yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan fokus pada relokasi dan rehabilitasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan dilakukan dalam beberapa dimensi, yaitu permukiman, bantuan kemanusiaan, psikologis, dan ekonomi. Temuan ini memperkuat bahwa relokasi fisik masyarakat tidak dapat dipisahkan dari aspek rehabilitasi sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Temuan lapangan dapat diuraikan sebagai berikut:

Relokasi Permukiman dan Pemberian Unit Rumah

Relokasi merupakan respons awal terhadap kerusakan infrastruktur dan ancaman keselamatan warga. Banjir lahar dingin menyebabkan kehancuran permukiman di beberapa nagari, mendorong pemerintah untuk membangun unit rumah baru bagi warga terdampak di lokasi yang dinilai lebih aman. Proses relokasi ini sejalan dengan konsep relokasi sebagai perpindahan penduduk dari wilayah rawan bencana ke wilayah yang lebih aman demi melindungi keselamatan jiwa dan harta benda.

Widya, warga Nagari Kapalo Koto, menyampaikan bagaimana rumah-rumah warga rusak berat sehingga mereka harus mengungsi ke tempat lain. Hal ini menunjukkan bahwa relokasi menjadi solusi darurat sekaligus awal dari proses pemulihan jangka panjang.

“...Banjir lahar dingin itu merusak jalan utama, bahkan rumah-rumah warga juga banyak yang hanyut dan terkena material banjir, jadi warga yang terdampak tersebut terpaksa harus mengungsi ke rumah saudaranya untuk sementara, sebagian juga ada yang terpaksa mengontrak...” (Wawancara pada 10 Mei 2025).

Kondisi serupa juga dialami oleh warga lainnya yang terdampak secara langsung oleh derasnya arus banjir lahar dingin. Zulmawati, warga Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, mengungkapkan bagaimana rumahnya diterjang material banjir yang menyebabkan kerusakan parah:

“...Airnya waktu itu deras sekali, datang tiba-tiba, sampai menghantam rumah saya. Ada batu besar masuk ke dalam rumah, sampai lantai rumah hancur, barang-barang pada hanyut. Suami saya aja sampe trauma liatnya.” (Wawancara pada 10 Mei 2025).

Kerusakan rumah, kehilangan harta benda, serta ketakutan yang terus menghantui, terutama saat hujan turun kembali, memperlihatkan bahwa pemulihan pascabencana harus mencakup aspek material maupun mental. Trauma yang dialami suami Zulmawati menegaskan perlunya dukungan psikososial yang sistematis sebagai bagian dari strategi rehabilitasi yang berkelanjutan.



Gambar 1. Dokumentasi kerusakan jalan, rumah, dan proses perbaikan infrastruktur di Nagari Sungai Pua pasca banjir lahar dingin
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan gambar diatas kerusakan infrastruktur yang ditimbulkan oleh banjir lahar dingin. Jalan-jalan utama yang menjadi akses vital masyarakat terlihat rusak berat, demikian pula dengan rumah-rumah warga yang terdampak secara langsung oleh aliran material vulkanik. Kerusakan ini tidak hanya mengganggu mobilitas dan aktivitas ekonomi warga, tetapi juga menunjukkan betapa rentannya kawasan permukiman yang berada di jalur rawan bencana. Proses perbaikan infrastruktur yang telah mulai dilakukan tampak dalam bentuk perbaikan jalan, pembangunan ulang beberapa rumah, serta normalisasi saluran air. Upaya ini menjadi bagian dari fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang sangat penting dalam memulihkan kehidupan masyarakat terdampak. Selain itu, dokumentasi ini mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait dalam membangun kembali sarana prasarana yang rusak, sekaligus menjadi bukti nyata dari pemulihan yang bertahap dan berkelanjutan. Selain kerusakan pada infrastruktur permukiman, dinamika aliran banjir lahar dingin juga dapat diamati dari distribusi material vulkanik di titik-titik tertentu.



Gambar 2. Material batu besar yang terbawa aliran banjir lahar dingin di Bukik Batabuah, Canduang.
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan gambar diatas di wilayah Bukik Batabuah, Canduang, ditemukan material batuan berukuran besar yang terbawa oleh aliran banjir lahar dingin. Keberadaan batu-batu besar ini menunjukkan bahwa aliran yang terjadi memiliki energi dan tekanan yang sangat tinggi, cukup kuat untuk mengangkut material berat dari hulu ke wilayah yang lebih rendah. Kondisi ini memperkuat karakteristik banjir lahar dingin

sebagai salah satu bencana sekunder yang sangat destruktif, terutama ketika curah hujan tinggi terjadi setelah erupsi gunung berapi. Batu-batu besar tersebut tidak hanya mengancam keselamatan jiwa dan kerusakan properti saat kejadian, tetapi juga menyisakan risiko jangka panjang, seperti penyumbatan sungai dan saluran irigasi.

Sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana, pemerintah melaksanakan program pembangunan unit-unit rumah baru bagi warga terdampak banjir lahar dingin. Pembangunan ini dilaksanakan baik di atas lahan milik pemerintah maupun lahan pribadi milik warga, dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat serta fasilitasi dari kementerian terkait. Relokasi permukiman dilakukan di lokasi yang telah dinilai memiliki tingkat risiko bencana yang lebih rendah, sebagai bentuk mitigasi jangka panjang.

Selain hunian, pemerintah juga membangun fasilitas dasar penunjang kehidupan, seperti mushala, posyandu, jaringan air bersih, instalasi listrik, dan akses jalan menuju permukiman baru. Meskipun demikian, relokasi ini turut membawa tantangan tersendiri bagi masyarakat, terutama dalam hal adaptasi terhadap lingkungan baru dan perubahan kondisi sosial-ekonomi. Banyak warga kehilangan sumber penghidupan karena lokasi baru jauh dari pusat aktivitas ekonomi yang sebelumnya mereka jalani. Zulmawati, salah seorang warga terdampak, menggambarkan kondisi tersebut:

“...Meski rumah saya selamat, warung yang saya kelola kini sepi karena banyak yang masih takut untuk datang. Mereka merasa trauma, apalagi saat hujan turun.” (Wawancara 10 Mei 2025).

Meskipun relokasi memberikan solusi keamanan fisik, tantangan baru muncul terkait kondisi sosial dan akses terhadap kebutuhan dasar di lokasi permukiman baru. Banyak warga menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda, terutama terkait ketersediaan fasilitas publik yang memadai. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran tentang kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka di tempat yang baru. Widya, salah seorang warga, menyampaikan kekhawatiran tersebut:

“...Kami memilih untuk pindah ke rumah yang lebih aman, tetapi ada kekhawatiran tentang fasilitas dasar seperti air bersih dan akses ke klinik kesehatan yang jauh.” (Wawancara 10 Mei 2025).

Ini menunjukkan bahwa relokasi fisik saja tidak cukup untuk memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, keberhasilan relokasi sebagai bagian dari strategi pemulihan sangat bergantung pada keterpaduan antara aspek fisik, sosial, dan ekonomi yang berkelanjutan.

Bantuan dari Relawan

Selain intervensi dari pemerintah, kehadiran relawan dari berbagai lembaga dan organisasi kemanusiaan juga memainkan peran penting dalam proses pemulihan awal setelah bencana. Bantuan yang diberikan meliputi sembako, makanan siap saji, pakaian layak pakai, perlengkapan bayi, kebutuhan sanitasi, serta penyediaan dapur umum dan layanan kesehatan darurat. Kehadiran para relawan ini sangat vital, terutama pada fase tanggap darurat ketika masyarakat masih berada dalam kondisi krisis dan belum sepenuhnya tersentuh oleh sistem bantuan formal. Zulmawati salah satu warga Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang mengungkapkan:

“...Waktu itu banyak relawan yang datang, mereka bukan cuma ngasih bantuan, tapi juga duduk bareng kami, dengerin cerita kami, ngajak anak-anak bermain. Rasanya kayak nggak sendiri, kami jadi lebih kuat karena merasa diperhatikan. Ada juga mahasiswa dari UNP dan Unand yang datang bawa sembako, pakaian, bantu bersihin rumah-rumah yang rusak. Kami sangat terbantu...” (Wawancara pada 10 Mei 2025)

Para relawan tidak hanya bertindak sebagai penyedia bantuan material, tetapi juga menjadi simbol solidaritas kemanusiaan yang memperkuat kondisi mental dan emosional warga terdampak. Dalam konteks rehabilitasi sosial, keberadaan mereka membantu membangun kembali rasa kebersamaan, empati, dan semangat untuk bangkit dari keterpurukan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemulihan masyarakat pascabencana tidak hanya bergantung pada relokasi fisik dan bantuan infrastruktur dari pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan sosial yang kuat dari berbagai pihak untuk membangun kembali kehidupan warga secara menyeluruh.

Bantuan Psikologis

Aspek psikologis menjadi salah satu komponen penting dalam proses rehabilitasi masyarakat pasca banjir lahar dingin. Banyak warga mengalami trauma yang mendalam akibat kehilangan rumah, anggota keluarga, serta mata pencaharian. Perasaan takut, cemas, hingga stres berkepanjangan menjadi bagian dari beban mental yang harus ditanggung oleh masyarakat terdampak, terlebih oleh anak-anak dan kelompok rentan lainnya.

“... Waktu awal kejadian, banyak relawan datang bukan cuma bawa makanan, tapi juga ngajak anak-anak main, ngadain pengajian, dan ngobrol sama kami. Itu sangat membantu, karena kami nggak cuma butuh bantuan barang, tapi juga butuh semangat untuk bangkit...” (Wawancara pada 10 Mei 2025).

Sebagai bentuk upaya pemulihan psikososial, beberapa layanan konseling kelompok, kegiatan trauma healing, serta dukungan keagamaan telah dilaksanakan oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk membantu warga mengatasi trauma dan membangun kembali ketahanan mental mereka di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih.

Namun, implementasi bantuan psikologis ini masih menghadapi kendala. Cakupan wilayah yang terbatas dan jumlah tenaga profesional yang belum mencukupi menyebabkan tidak semua warga terdampak mendapatkan layanan yang memadai. Padahal, aspek psikologis memiliki peran krusial dalam mempercepat proses adaptasi masyarakat terhadap kondisi baru, termasuk dalam menerima relokasi serta membangun kembali kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Oleh karena itu, dukungan psikologis perlu menjadi bagian integral dari strategi rehabilitasi yang berkelanjutan dalam merespons bencana alam seperti yang terjadi di Kabupaten Agam.

Tantangan Pemulihan Ekonomi

Pemulihan ekonomi menjadi tantangan terbesar dalam proses rehabilitasi masyarakat pasca banjir lahar dingin akibat erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Agam. Banyak warga kehilangan mata pencaharian, seperti usaha kecil, pertanian, atau warung yang hancur akibat banjir. Dampak banjir lahar dingin tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik pada permukiman dan infrastruktur, tetapi juga secara signifikan mengguncang kehidupan ekonomi masyarakat terdampak. Banyak warga yang sebelumnya menggantungkan hidup pada usaha kecil, pertanian, atau warung kelontong harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan sumber penghasilan secara tiba-tiba. Zulmawati, salah seorang warga terdampak, mengungkapkan betapa beratnya dampak tersebut bagi dirinya:

“...Dampak banjir lahar dingin tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik pada permukiman dan infrastruktur, tetapi juga secara signifikan mengguncang kehidupan ekonomi masyarakat terdampak. Banyak warga yang sebelumnya menggantungkan hidup pada usaha kecil, pertanian, atau warung kelontong harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan sumber penghasilan secara tiba-tiba. Zulmawati, salah seorang warga terdampak, mengungkapkan betapa beratnya dampak tersebut bagi dirinya...” (Wawancara pada 10 Mei 2025).

Kerusakan tempat usaha dan hilangnya barang dagangan membuat warga harus memulai kembali dari nol dengan segala keterbatasan yang ada. Situasi ini menimbulkan beban psikologis tambahan karena ketidakpastian masa depan dan kekhawatiran tentang bagaimana cara mempertahankan kehidupan sehari-hari. Meskipun pemerintah telah berupaya memberikan bantuan awal berupa sembako dan fasilitas dasar, kebutuhan akan dukungan jangka panjang seperti pelatihan keterampilan dan akses modal usaha tetap menjadi hal yang sangat mendesak. Ketidadaan program pemberdayaan ekonomi yang memadai berpotensi memperlambat proses pemulihan dan membuat warga kesulitan untuk bangkit secara mandiri. Dalam konteks ini, Widya menegaskan pentingnya bantuan lanjutan yang tidak hanya berupa bantuan materi, tetapi juga pendampingan dan pelatihan agar warga dapat membangun kembali usaha mereka dan mengembalikan kehidupan ekonominya:

“...Banyak yang kehilangan tempat usaha dan barang dagangannya. Pemerintah sudah memberikan bantuan, tapi kami masih butuh pelatihan dan modal usaha untuk memulai kembali. Kami benar-benar ingin bangkit dan mandiri, namun tanpa pelatihan yang memadai dan modal yang cukup, usaha kami sulit untuk berkembang kembali seperti semula...” (Wawancara pada 10 Mei 2025).

Meskipun pemerintah telah memberikan bantuan awal berupa sembako dan fasilitas dasar, kebutuhan jangka panjang seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pendampingan usaha belum sepenuhnya terpenuhi. Bantuan sembako bersifat sementara dan tidak cukup untuk membangun kembali perekonomian warga secara berkelanjutan.

Untuk itu, diperlukan strategi pemberdayaan ekonomi yang menyeluruh sebagai bagian dari program rehabilitasi. Langkah-langkah seperti pelatihan keterampilan kerja, penguatan kelembagaan ekonomi lokal, serta fasilitasi terhadap akses permodalan dan pasar menjadi sangat penting dalam proses pemulihan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan ketahanan ekonomi masyarakat yang tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga bertumpu pada kemampuan mereka untuk bangkit secara mandiri dalam kehidupan pascabencana.

Pembahasan

Dalam konteks kebencanaan, relokasi dan rehabilitasi merupakan dua komponen utama yang sangat krusial dalam fase pemulihan masyarakat terdampak bencana. Relokasi biasanya dipahami sebagai proses pemindahan penduduk dari zona rawan bencana menuju lokasi yang lebih aman dan berisiko lebih rendah, guna menjamin keselamatan jiwa dan harta benda. Sedangkan rehabilitasi mencakup rangkaian upaya pemulihan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada pemulihan fisik, melainkan juga aspek sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat sehingga mereka dapat kembali hidup secara mandiri dan bermartabat (UNDRR, 2015). Kedua proses ini saling terkait dan harus berjalan secara terpadu agar tujuan pemulihan pascabencana dapat tercapai secara optimal (Ariyanti, 2020).

Penelitian ini yang dilakukan di Kecamatan Sungai Pua dan Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, mengungkapkan bahwa banjir lahar dingin akibat erupsi Gunung Marapi memberikan dampak yang sangat besar terhadap kondisi permukiman dan infrastruktur dasar masyarakat. Kerusakan berat pada rumah warga dan fasilitas umum memaksa pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat dengan melakukan relokasi fisik ke lokasi yang lebih aman dan jauh dari ancaman bencana berulang. Program pembangunan unit-unit rumah layak huni yang didanai oleh pemerintah pusat dan difasilitasi kementerian terkait menunjukkan upaya sistematis dalam mengurangi risiko bencana jangka panjang. Relokasi ini sesuai dengan arahan BNPB (2021) yang menekankan pentingnya pemindahan penduduk ke tempat yang aman dan memperhatikan aspek kelayakan hidup agar masyarakat tidak hanya aman secara fisik tetapi juga dapat hidup dengan kualitas yang baik.

Namun, hasil wawancara lapangan mengungkapkan berbagai tantangan serius yang muncul setelah relokasi fisik. Masyarakat yang sudah kehilangan tempat tinggal lama harus menghadapi perubahan lingkungan yang signifikan. Seperti yang disampaikan oleh Widya dan Zulmawati, warga terdampak, mereka mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru yang secara sosial dan ekonomi jauh berbeda. Faktor jarak lokasi relokasi yang jauh dari pusat kegiatan ekonomi mengakibatkan hilangnya akses terhadap sumber penghidupan yang selama ini menopang kehidupan mereka, seperti pertanian, usaha kecil, dan warung. Kondisi ini menyebabkan penurunan pendapatan keluarga dan ketidakpastian ekonomi yang memperberat proses pemulihan.

Namun, hasil wawancara lapangan mengungkapkan berbagai tantangan serius yang muncul setelah relokasi fisik. Masyarakat yang sudah kehilangan tempat tinggal lama harus menghadapi perubahan lingkungan yang signifikan. Seperti yang disampaikan oleh Widya dan Zulmawati, warga terdampak, mereka mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru yang secara sosial dan ekonomi jauh berbeda. Faktor jarak lokasi relokasi yang jauh dari pusat kegiatan ekonomi mengakibatkan hilangnya akses terhadap sumber penghidupan yang selama ini menopang kehidupan mereka, seperti pertanian, usaha kecil, dan warung. Kondisi ini menyebabkan penurunan pendapatan keluarga dan ketidakpastian ekonomi yang memperberat proses pemulihan (Lassa, 2018).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa relokasi fisik tidak cukup untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Relokasi harus diimbangi dengan proses rehabilitasi yang menyeluruh dan berkelanjutan, yang meliputi penyediaan fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, akses kesehatan, serta sarana pendidikan dan sosial budaya agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan normal. Selain itu, dukungan ekonomi yang berkelanjutan juga harus diberikan, misalnya melalui program pelatihan keterampilan kerja, pembinaan kewirausahaan, dan kemudahan akses permodalan agar masyarakat dapat memulai kembali usaha atau mengembangkan sumber penghasilan baru (Rahman et al., 2021).

Dalam konteks psikososial, bencana membawa trauma berat yang berdampak pada kesehatan mental warga, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Trauma ini jika tidak ditangani dengan baik dapat menghambat proses adaptasi dan mengganggu interaksi sosial masyarakat di lingkungan baru. Upaya rehabilitasi psikologis melalui layanan konseling, kegiatan trauma healing, serta pendampingan keagamaan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi sosial sangat membantu dalam memulihkan ketahanan mental warga. Namun demikian, keterbatasan jumlah tenaga profesional dan cakupan wilayah menjadi hambatan dalam pemenuhan layanan ini, sehingga perlu perhatian lebih agar layanan psikologis dapat menjangkau seluruh masyarakat terdampak secara efektif (Putri & Prasetyo, 2020).

Peran relawan dan organisasi kemanusiaan juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Kehadiran mereka dalam fase tanggap darurat hingga rehabilitasi awal memberikan bantuan materiil dan dukungan emosional yang sangat penting. Bantuan seperti sembako, pakaian, perlengkapan bayi, serta layanan dapur umum dan kesehatan darurat tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga memperkuat rasa solidaritas sosial di tengah situasi krisis. Konsep *community resilience* yang diusung oleh Wisner et al. (2012) menegaskan bahwa masyarakat yang diberdayakan dan dilibatkan aktif dalam proses pemulihan akan memiliki ketahanan yang lebih baik menghadapi bencana di masa mendatang. Solidaritas dan dukungan sosial menjadi modal penting yang memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan dalam membangun kembali kehidupan.

Dari segi ekonomi, pemulihan merupakan tantangan yang paling kompleks dan membutuhkan waktu lebih panjang. Banyak warga kehilangan modal usaha, alat produksi, dan pelanggan yang sebelumnya menjadi sumber penghasilan utama. Bantuan sembako dan fasilitas dasar yang diberikan pemerintah memang menjadi penyelamat sementara, namun tidak cukup untuk membangun ekonomi masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu, program rehabilitasi harus difokuskan pada pemberdayaan ekonomi, dengan menawarkan pelatihan keterampilan baru, fasilitasi modal usaha, pendampingan bisnis, serta penguatan kelembagaan ekonomi lokal seperti koperasi dan kelompok usaha bersama. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip sustainable livelihoods yang menempatkan ketahanan ekonomi sebagai salah satu pilar utama dalam pemulihan bencana, di mana masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi mampu bangkit dan beradaptasi dengan kondisi baru secara mandiri (Chambers & Conway, 1992).

Secara menyeluruh, temuan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya integrasi antara relokasi yang aman dengan rehabilitasi sosial, psikologis, dan ekonomi yang holistik sebagai strategi utama dalam pemulihan pasca banjir lahar dingin di Kabupaten Agam. Tanpa pendekatan rehabilitasi yang menyeluruh, relokasi berisiko menimbulkan masalah baru seperti disrupsi sosial, stres berkepanjangan, dan kemiskinan struktural. Sebaliknya, rehabilitasi yang dilakukan tanpa memperhatikan aspek keamanan fisik dapat menempatkan masyarakat pada risiko bencana yang berulang dan merugikan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi kebijakan pemerintah yang mengedepankan keberlanjutan dan partisipasi aktif masyarakat, serta dukungan komunitas dan relawan sebagai mitra dalam proses pemulihan. Hal ini sejalan dengan prinsip *build back better* dari Kerangka Sendai yang menekankan bahwa proses pemulihan harus mengarah pada pembangunan masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi bencana di masa depan (UNDRR, 2015).

Sebagai refleksi, pengalaman relokasi dan rehabilitasi di Kabupaten Agam dapat menjadi contoh penting bagi pengelolaan risiko bencana di wilayah lain yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang serupa. Pendekatan terpadu yang menggabungkan aspek fisik, sosial, psikologis, dan ekonomi secara komprehensif dapat menjadi model efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat pasca bencana sekaligus memperkuat ketahanan kolektif mereka terhadap ancaman bencana yang terus mengintai. Dalam jangka panjang, investasi pada rehabilitasi yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas adaptasi sehingga komunitas tidak hanya mampu bertahan tetapi juga berkembang di tengah ketidakpastian alam.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dalam konteks kebencanaan, relokasi dan rehabilitasi merupakan dua komponen kunci dalam fase pemulihan masyarakat terdampak. Relokasi mengacu pada pemindahan penduduk dari zona rawan bencana ke lokasi yang lebih aman, sementara rehabilitasi meliputi pemulihan kondisi sosial, ekonomi, infrastruktur, serta dukungan psikososial yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan masyarakat ke keadaan semula atau lebih baik.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kombinasi antara relokasi yang aman dan rehabilitasi yang holistik merupakan strategi yang penting dalam pemulihan pasca-bencana. Tanpa rehabilitasi yang menyeluruh, relokasi berisiko menciptakan masalah baru bagi masyarakat, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, integrasi antara kebijakan pemerintah, dukungan komunitas, dan keterlibatan masyarakat menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan pasca-bencana di Kabupaten Agam. Penelitian ini masih terbatas mengenai upaya pemulihan pasca bencana banjir lahar dingin di Kabupaten Agam, diharapkan penelitian selanjutnya mengevaluasi kebijakan realokasi terkait dengan dampak pasca bencana banjir lahar dingin ini.

Rujukan

- Alfin, A. (2022). *Manajemen bencana di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Andri, Y. (2024). Analisis kerusakan lahan dan mitigasi bencana di kawasan Gunung Marapi. *Jurnal Kebencanaan dan Lingkungan*, 10(1), 45–59.
- Ariyanti, D. (2020). Integrasi Relokasi dan Rehabilitasi dalam Pemulihan Pascabencana: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bencana*, 8(2), 145-160.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2011). *Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana*. Jakarta: BNPB.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat. (2024). *Laporan bencana erupsi Gunung Marapi dan dampaknya di Kabupaten Agam dan Tanah Datar*. Padang: BPBD Sumbar.

-
- Chambers, R., & Conway, G. (1992). *Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century*. Institute of Development Studies (IDS), University of Sussex.
- Elan, S. (2024). Strategi pemulihan pascabencana berbasis komunitas di Sumatera Barat. *Jurnal Sosial dan Kemanusiaan*, 8(1), 75–88.
- Honesti, L. (2023). Dampak sosial dan lingkungan letusan Gunung Marapi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Lingkungan*, 5(3), 112–126.
- Lassa, J. A. (2018). Disaster Governance and Challenges in Indonesia. *Disaster Prevention and Management*, 27(1), 97–109.
- Magma Indonesia. (2024). Laporan aktivitas Gunung Marapi, Desember 2023.
- Moleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Putri, D., & Prasetyo, B. (2020). Pelayanan Psikososial dalam Penanggulangan Bencana: Studi Kasus di Wilayah Rawan Bencana. *Jurnal Psikologi Sosial*, 14(1), 45–57.
- Rahadah, A. (2024). Penilaian risiko banjir lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Kebencanaan Alam*, 9(1), 30–44.
- Rahman, A., Suryani, E., & Nugroho, B. (2021). Penguatan Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana melalui Pelatihan Kewirausahaan. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 10(1), 75–88.
- Saputra, R., & Wibowo, H. (2023). Efektivitas program relokasi korban bencana lahar dingin di Jawa Barat. *Jurnal Penanggulangan Bencana*, 6(2), 90–105.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction). (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. Geneva: UNDRR.
- Utami, N. S., & Purwanto, D. (2022). Rehabilitasi sosial ekonomi masyarakat terdampak bencana vulkanik di Jawa Timur. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Lingkungan*, 11(4), 220–235.
- Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2012). *At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters* (2nd ed.). Routledge
-